

INDONESIA REPORT

**PROSES REKRUTMEN PARTAI POLITIK
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KANDIDASI PEREMPUAN
DALAM PEMILU 2024**

**STUDI KASUS: PARTAI UMMAT DAN
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

FELIA PRIMARESTI

THE  NDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



@indonesian.institute



The Indonesian Institute



@the_indonesian



www.theindonesianinstitute.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan affirmative action merupakan satu instrumen yang digunakan dalam rangka meningkatkan angka kandidasi dan juga representasi perempuan dalam kursi parlemen. Namun, meskipun telah ada upaya untuk memperkenalkan kebijakan yang mendukung peningkatan kandidasi perempuan di berbagai partai politik, banyak penelitian terdahulu menemukan bahwa implementasinya masih belum berjalan secara bermakna. Hal ini disebabkan oleh berbagai strategi yang diterapkan oleh partai-partai politik, yang mungkin belum sepenuhnya mendorong kandidasi perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk lebih mendalam dalam mengkaji bagaimana partai politik baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat, mengimplementasikan strategi konkret dalam rangka meningkatkan kandidasi perempuan di internal partainya.

Penelitian ini mencoba mengungkapkan taktik dan langkah-langkah yang diterapkan oleh kedua partai ini guna mendorong partisipasi perempuan dalam politik, serta menganalisis dampak dari strategi-strategi ini terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik ini, kita dapat memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai peran partai politik dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mendorong keterlibatan perempuan di dalamnya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa partai politik baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat, cenderung masih fokus pada kuantitas daripada kualitas kader perempuan yang mereka rekrut. Hal ini cukup masuk akal karena prioritas utama yang dijalankan oleh partai politik baru adalah untuk “bertahan hidup”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengembangkan sistem internal partai politik, terutama dalam hal sistem rekrutmen dan pengkaderan. Dengan melakukan perubahan yang lebih bermakna dalam hal ini, partai-partai politik dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa kader perempuan yang terpilih memiliki kualitas dan kapasitas yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan mendorong kesetaraan gender dalam politik.

Selain itu, sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang partisipasi dalam partai politik juga menjadi penting. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan topik-topik dasar ini, dan menjadi lebih terampil dalam memahami peran perempuan dalam politik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong dan mendukung peningkatan representasi dan partisipasi perempuan yang lebih bermakna dalam politik. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait isu-isu gender dan hak asasi manusia, diharapkan masyarakat akan lebih mendukung perempuan yang terlibat dalam politik, serta lebih kritis terhadap stereotip dan bias gender yang masih ada dalam masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi dan pendidikan masyarakat dapat menjadi alat penting dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik dan mewujudkan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara.



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	2
Daftar Singkatan	3
Abstrak	4
Pendahuluan.....	4
Pertanyaan Penelitian.....	7
Metode Penelitian	7
Kajian Literatur/Landasan Teori.....	8
Temuan	11
Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat.....	11
Strategi Untuk Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Internal Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia.....	15
Partai Ummat	17
Partai Solidaritas Indonesia	19
Model Seleksi Kandidat Memengaruhi Kandidasi Perempuan.....	20
Kesimpulan	21
Rekomendasi	22
Referensi	23
Profil Penulis.....	25
Profil Lembaga.....	25



DAFTAR SINGKATAN

AD	Anggaran Dasar
ART	Anggaran Rumah Tangga
DCS	Daftar Calon Sementara
DCT	Daftar Calon Tetap
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
KPU	Komisi Pemilihan Umum
PAN	Partai Amanat Nasional
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PSI	Partai Solidaritas Indonesia
PU	Partai Ummat
UU	Undang-undang



PROSES REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KANDIDASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024

STUDI KASUS: PARTAI UMMAT DAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

FELIA PRIMARESTI

ABSTRAK

Kebijakan affirmative action yang diimplementasikan dalam bentuk aturan kuota 30% perempuan dalam partai politik sudah cukup lama diterapkan di Indonesia. Namun, banyak penelitian terdahulu menemukan fakta bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan secara bermakna melalui banyak strategi yang diterapkan partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi yang digunakan partai politik baru, dalam hal ini adalah Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat, dalam meningkatkan kandidasi perempuan di partainya.

Data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan metode studi literatur dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Temuan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif seleksi kandidat yang dijelaskan oleh Pippa Norris, yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu sistem hukum, sistem elektoral dan sistem kepartaian. Temuan penelitian ini mencatat bahwa partai baru cenderung masih berorientasi pada kuantitas, belum pada kualitas kader perempuan yang mereka rekrut. Untuk itu, penting untuk terus mengembangkan sistem internal kepartaian utamanya yang berkait dengan sistem rekrutmen dan pengkaderan yang lebih bermakna.

Kata kunci: Partai Solidaritas Indonesia, Partai Ummat, Partai Politik, Rekrutmen Partai Politik

Pendahuluan

Secara biologis, laki-laki dan perempuan hadir dengan wujud yang berbeda. Dengan demikian, dipercaya kebutuhan antara keduanya pun berbeda (Harari, 2016). Dalam hal ini, muncul pertanyaan menarik mengenai apakah kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda tersebut dapat diakomodir dengan baik, efektif dan adil? Mitosnya, banyak kelompok feminis yang mengimani bahwa ketersediaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan belum seimbang. Untuk menyeimbangkan, negara perlu hadir dalam bentuk regulasi dan kebijakan. Permasalahannya adalah, dalam masyarakat yang masih menganut sistem patriarkis, di mana keterwakilan di banyak sektor masih didominasi laki-laki, regulasi dan kebijakan yang ada masih belum bisa berlaku akomodatif terhadap kebutuhan perempuan (Phillips, 1991).

Ini adalah permasalahan yang menjadi tantangan hampir di semua sistem pemerintahan yang ada di dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Parlemen terutama, seharusnya hadir sebagai lembaga yang dapat merepresentasikan segala sektor. Namun nyatanya, hampir semua parlemen



di dunia dan lagi-lagi di Indonesia, didominasi oleh laki-laki (Hillman, 2017). Menanggapi isu ini, banyak negara kemudian menerapkan sistem dan mekanisme dalam rangka meningkatkan representasi perempuan di parlemen salah satunya dengan menerapkan kebijakan kuota gender.

Pada tahun 1995, hanya ada empat negara yang mengadopsi sistem tersebut. Namun tren global menunjukkan semakin meningkatnya jumlah negara yang menerapkan kebijakan kuota gender setidaknya dalam 20 tahun terakhir, tercatat sudah ada 120 negara menggunakan sistem tersebut. Di Indonesia sendiri, kuota gender mulai diadaptasi pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (Shedova, 2000).

Sejak diterapkannya kebijakan afirmatif ini di Indonesia, partai politik diharuskan memiliki setidaknya 30% kader perempuan dalam kepengurusan mereka di tingkat pusat. Undang-undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur hal ini untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Kuota gender dalam Undang-Undang tersebut juga mengharuskan partai politik yang mengajukan anggota legislatif untuk pemilihan umum untuk bisa mencalonkan setidaknya 30% perempuan dari total yang diajukan.

Kebijakan ini kemudian berimplikasi pada bagaimana partai politik menentukan sistem dan mekanisme dalam melakukan rekrutmen kader, terutama untuk kader perempuannya. Tentu ini menjadi tantangan besar mengingat setidaknya dalam konteks Indonesia sendiri, terdapat dua hambatan utama: hambatan budaya dan hambatan institusional (Mariyah, 2002).

Hambatan budaya mencakup stereotipe dan nilai-nilai kepercayaan yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Pada Pemilu 2024 misalnya, banyak kandidat perempuan mengalami dominasi kampanye yang menampilkan foto-foto seksi, dan ini menjadi sorotan media sosial. Beberapa kritikus menganggap bahwa partai politik tidak serius dalam menerapkan kuota 30%, terutama ketika mereka merekrut selebriti untuk memenuhi kuota tersebut.

Selain hambatan budaya, sistem elektoral di Indonesia memengaruhi representasi perempuan di parlemen. Sistem proporsional terbuka memungkinkan konstituen untuk memilih baik partai politik maupun calonnya. Namun, perlu sumber daya yang signifikan, seperti "Tim Sukses" dan praktik politik uang, yang memengaruhi preferensi pemilih. Karena perbedaan sumber daya dan harta, kampanye dengan pengeluaran besar lebih mudah dilakukan oleh laki-laki, sehingga menjadi hambatan bagi perempuan, terutama yang bukan dari kalangan elit, untuk terpilih dalam sistem ini.



Dengan banyaknya hambatan yang ada, seringkali keterwakilan perempuan masih terbatas pada kehadiran politik, tanpa memperhatikan gagasan-gagasan yang mereka bawa. Statistik menunjukkan bahwa jumlah perempuan di parlemen selalu lebih sedikit daripada laki-laki sejak tahun 1955 hingga 2014. Dari sedikitnya jumlah perempuan yang bisa lolos ke parlemen, kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Ini juga seringkali dibarengi dengan modal yang mereka miliki berupa relasi-relasi politik yang bersifat personal (Anggraini, 2019). Merujuk pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa bulan lalu, menarik melihat presentase kuota perempuan yang dimiliki oleh Partai Ummat cukup tinggi, yaitu di angka 40,04%, hampir sama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menduduki presentase di angka 40.34%. Penting untuk disampaikan di awal bahwa ketika peneliti mulai membuat draf tulisan ini, Daftar Calon Tetap (DCT) belum ditetapkan oleh KPU. Sehingga, untuk melihat gambaran secara garis besarnya, peneliti menggunakan DCS.

Data ini menjadi menarik mengingat baik Partai Ummat (PU) maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan dua partai yang terbilang baru dengan ideologi yang berbeda. Partai Ummat merupakan partai politik konservatif yang berlandaskan nilai-nilai islam di mana dalam salah satu misi mereka disebutkan bahwa mereka ingin memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, dan optimalisasi perannya untuk kemaslahatan ummat.

Kontras dengan Partai Ummat, PSI adalah partai progresif liberal yang menjunjung nilai-nilai anti korupsi dan anti intoleransi. Disebutkan dalam laman resmi PSI bahwa PSI membutuhkan anak-anak muda, terutama perempuan, untuk bisa berkontribusi dalam kancah politik. Disebutkan pula, bahwa PSI memberikan porsi yang besar pada perempuan, sehingga gerakan politik PSI tidak hanya sekedar memenuhi syarat 30% perempuan, tapi juga seluruh keputusan politiknya diambil dari keterlibatan aktif perempuan di dalamnya.

Dengan melihat kembali DCS yang sudah dijelaskan di awal, menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan kedua partai, mengingat dalam konteks ideologi, kedua partai tersebut cukup berseberangan. Di sisi lain, kedua partai tersebut dapat memiliki representasi perempuan di dalam pencalonan pemilu dengan perbedaan jumlah yang tidak signifikan.

Ini juga penting mengingat kajian mengenai partai politik seringkali masih berfokus pada tahapan dan proses rekrutmen kader yang dilakukan pada partai-partai lama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini misalnya saja ditunjukkan melalui penelitian terdahulu dengan tema marketing politik politisi perempuan dalam Partai PDI-Perjuangan, studi mengenai citra partai PAN, hingga pola rekrutmen partai PKB (Yeshica, 2018; Tantonno, 2019; Riqba, 2019).



Dengan demikian, menjadi penting juga untuk melihat pola rekrutmen kader partai politik yang masih terbilang baru seperti Partai Ummat dan PSI. Selain itu, belum banyak studi yang mengkaji mengenai strategi partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan, yang menganalisis model seleksi kandidat yang digunakan partai politik terkait.

Untuk itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan dari studi-studi terkait yang ada dengan mengkaji strategi yang diterapkan Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana model seleksi kandidat yang diterapkan di kedua partai dapat mempengaruhi representasi perempuan di dalamnya.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana proses rekrutmen yang diterapkan dalam internal Partai Ummat dan PSI?
2. Bagaimana strategi untuk mendorong partisipasi perempuan dalam internal Partai Ummat dan PSI?
3. Bagaimana model seleksi kandidat bisa memengaruhi representasi perempuan di Partai Ummat dan PSI?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode penelitian ini dipilih karena data dan informasi yang diperoleh bisa disajikan secara lebih rinci dan komprehensif, mengingat terbatasnya sumber sekunder terkait dengan proses rekrutmen, pengembangan strategi dan model seleksi kandidat yang diterapkan dalam Partai Ummat dan PSI.

Penelitian kualitatif ini lebih tepatnya akan menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan di lapangan diorganisir dan dideskripsikan dengan baik untuk memberikan gambaran yang sistematis, singkat, dan jelas tentang suatu peristiwa atau fenomena (Sholikhah, 2019). Selain itu, penelitian ini mengangkat studi kasus agar informasi yang dikumpulkan selama penelitian dapat dianalisis dan kesimpulan dapat diambil berdasarkan contoh kasus yang ada (Sholikhah, 2019).

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kader dari Partai Ummat dan PSI di tingkat pusat, utamanya kader perempuan, untuk mendapatkan cerita dan pengalaman mereka selama menjalani proses rekrutmen dan kaderisasi di partai terkait. Data dalam penelitian ini diambil lewat metode wawancara mendalam dan dokumentasi.

Wawancara mendalam adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data lapangan dengan cara melakukan pertemuan tatap muka langsung maupun tidak langsung dengan individu yang menjadi subjek penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan dengan kader perempuan di Partai Ummat dan PSI.



Sedangkan, instrumen dokumentasi dirancang untuk mengidentifikasi bukti-bukti sejarah, dasar hukum, serta peristiwa-peristiwa yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, objek dokumentasi yang dipilih adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Ummat dan AD/ART Partai Solidaritas Indonesia.

KAJIAN LITERATUR/LANDASAN TEORI

Studi yang membahas mengenai proses rekrutmen yang mana dalam hal ini adalah rekrutmen kader PSI pernah dilakukan contohnya saja oleh Helena Yolanda dengan judul penelitiannya, yaitu "Penerapan affirmative action dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019".

Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa proses dan tahapan rekrutmen yang dilakukan dalam internal PSI setidaknya terdiri dari dua gelombang, di mana setiap gelombang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran yang harus disertai dengan esai yang menjelaskan bagaimana strategi dan cara untuk melawan korupsi dan intoleransi. Tahap kedua adalah wawancara terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas melalui siaran langsung, dan yang terakhir adalah sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa ternyata PSI juga melakukan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan. Hal ini mereka lakukan dengan misalnya mencari kader perempuan ke komunitas-komunitas perempuan, memberikan pendidikan politik, dan memprioritaskan perempuan untuk bisa maju dalam kontestasi politik.

Di sisi lain, belum banyak studi yang mengkaji terkait dengan proses rekrutmen kader yang dilakukan oleh Partai Ummat, mengingat partai tersebut baru saja berdiri sekitar 2 tahun yang lalu. Namun, penelitian ini menemukan kajian yang dirasa masih relevan dengan judul "Strategi Partai Politik Baru Menuju Pemilihan Umum 2024: Studi Kasus pada Partai Ummat Provinsi Lampung" (Zainal, 2021).

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik, termasuk juga dengan Partai Ummat di dalamnya. Dalam merespons hal tersebut, Partai Ummat menggunakan metode komunikasi personal dari hati ke hati. Selain itu, pendekatan budaya dan agama juga dilakukan mengingat Partai Ummat merupakan partai dengan basis ideologi Islam. Ini dilakukan misalnya melalui kampanye untuk memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan.

Lebih jauh, hasil penelitian tersebut juga mencatat bahwa sebagai partai baru, Partai Ummat juga melakukan pendekatan, misalnya dengan mengadakan lomba dan beberapa kegiatan lain dengan nuansa Islami. Kegiatan lain yang dimaksud misalnya adalah bakti sosial, pengobatan gratis, pengajian dari masjid ke masjid dan membentuk Permata Ummat (Perempuan Utama Ummat) yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan agar dapat berkontribusi kepada masyarakat.



Selanjutnya, untuk membunyikan data yang diperoleh dalam penelitian ini, teori seleksi kandidat dipilih karena dinilai paling relevan. Selain itu, teori ini dipilih mengingat proses rekrutmen dan seleksi kandidat partai politik merupakan langkah penentu performa partai politik dalam pemilihan umum, utamanya berkaitan dengan representasi perempuan yang mereka bawa (Hazan, 2010:5-9).

Dalam hal proses rekrutmen, Pippa Norris menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang memengaruhinya. Pertama adalah sistem hukum, sistem elektoral, dan sistem kepartaian. Sistem hukum berarti segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang terkait. Misalnya, Undang-Undang Partai Politik dan juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Sistem elektoral berarti adalah sistem yang dibuat untuk pelaksanaan pilihan umum dan yang terakhir adalah sistem kepartaian.

Melengkapi gagasan yang sudah dibawa oleh Pippa Norris, Rueven Hazan dan Gideon Rahat (1993), menyampaikan setidaknya empat aspek utama yang digunakan dalam proses seleksi kandidat yang umumnya diterapkan dalam partai politik. Keempat aspek tersebut adalah, candidacy, selectorate, voting system, dan candidate selection methods.

Candidacy yang dimaksud adalah siapa saja yang diperbolehkan untuk maju dalam kontestasi politik dan dicalonkan oleh partai yang berkaitan. Model ini memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan inklusif dan eksklusif. Pendekatan inklusif berarti memberikan ruang kepada siapa saja untuk bisa maju dan menjadi kandidat dalam kontestasi politik. Sebaliknya, kontestasi eksklusif berarti memilih orang-orang tertentu untuk menjadi kandidat karena adanya suatu kondisi dan keterbatasan (Hazan, 2010:10).

Aspek kedua adalah selectorate yaitu petugas yang memiliki fungsi untuk menyeleksi calon kandidat. Terdapat lima model yang disampaikan. Pertama, seleksi yang dilakukan oleh pemilih. Kedua, seleksi yang dilakukan oleh anggota partai. Ketiga, proses seleksi yang dilakukan oleh perwakilan partai. Keempat, seleksi oleh elit partai, dan yang terakhir adalah model seleksi oleh pimpinan partai (Hazan, 2010:35).

Aspek selanjutnya adalah voting system and appointment system, yang menjelaskan bagaimana seorang kandidat dinominasikan dalam partainya. Aspek ini juga terbagi dalam dua kategori. Pertama adalah pemilihan dan penunjukan langsung. Pemilihan berarti menentukan kandidat dengan menerapkan prosedur pemilihan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan penunjukan langsung adalah metode yang digunakan tanpa adanya prosedur pemilihan (Haza, 2010:71).

Aspek yang terakhir merupakan candidate selection methods, di mana proses ruang ruang lingkup pengambilan keputusan dalam proses seleksi kandidat dibagi kedalam dua kategori lagi. Pertama adalah sentralistik yang berarti proses seleksi dan keputusan ada di tingkat nasional dan kepengurusan pusat. Kedua adalah desentralistik yang merupakan proses seleksi kandidat di tingkat regional atau lokal (Hazan, 2010:53).



TEMUAN

POLA REKRUTMEN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DAN PARTAI UMMAT

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai yang belum lama berdiri. Bahkan, Pemilu 2019 lalu merupakan pemilu pertama bagi PSI, sehingga menarik untuk melihat bagaimana pola rekrutmen yang mereka gunakan dalam rangka menjaring kader dan calon legislatif untuk diikutsertakan dalam Pemilu 2019 lalu dan utamanya di Pemilu 2024 mendatang. PSI merupakan partai dengan identitas kuat mengenai solidaritas, pluralitas beragama, suku dan bangsa. Bahkan, PSI mengklaim dirinya merupakan partai politik dengan model baru, di mana semua anggotanya berasal dari kelompok anak muda yang belum pernah terlibat dalam politik sebelumnya (Kompas, 1/3/2022).

Melalui sebuah kajian literatur, proses rekrutmen calon legislatif (caleg) yang diterapkan pada PSI secara umum terdiri dari lima tahapan. Pertama adalah seleksi administrasi, wawancara dengan panelis, kampanye mini, uji publik, dan polling. Artinya, PSI menerapkan proses rekrutmen yang terbuka, di mana mereka memberikan kebebasan dan kesempatan kepada siapa saja yang ingin menjadi anggota legislatif melalui PSI. Di sisi lain, mereka juga transparan dalam melakukan proses rekrutmen, hingga mengajak masyarakat luas untuk bisa berpartisipasi dalam proses seleksi pencalegannya (Sibagariang, 2021).

Pola rekrutmen yang diterapkan PSI bisa dibilang masih idealis. PSI melihat calon anggotanya dari bagaimana mereka memaparkan visi misi. Selain itu, PSI juga tidak mau merekrut calon anggota yang pernah menjadi bagian dari kepengurusan partai politik lama. Tak hanya selesai dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif saja, PSI juga aktif dalam memberikan bimbingan kampanye kepada kadernya lengkap dengan wawasan terkait politik dan kepemiluan. Menariknya, penetapan nomor urut dalam pemilihan calon legislatif di PSI dilakukan melalui undian nomor secara acak (Erawan 2020).

Sementara, cukup berbeda dengan PSI, Partai Ummat (PU) memiliki tahapan rekrutmen yang relatif lebih singkat, di mana proses awal yang harus dilewati oleh calon legislatif PU adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Ketika kandidat dinilai lolos dan memenuhi kriteria, maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pendidikan politik dan proses sosialisasi ke masyarakat.

Disampaikan juga oleh Ketua Tim Adhoc Pencalegan Partai Ummat dalam sebuah konferensi pers di Yogyakarta, Partai Ummat menggunakan dua pendekatan dalam melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif. Pertama adalah pendekatan yang sifatnya terbuka, di mana melalui laman resmi mereka, masyarakat yang tertarik dengan visi misi Partai Ummat dapat mengisi formulir tersebut. Pendekatan kedua adalah pendekatan personal kepada tokoh-tokoh potensial dari ormas Islam maupun pimpinan Muhammadiyah.



Selain itu, perlu dipahami juga bahwa Partai Ummat merupakan partai ideologis di mana hal-hal yang mereka perjuangkan dan sebarluaskan berlandaskan pada ideologi tertentu, yang mana dalam hal ini adalah ideologi Islam. Dengan demikian, bakal calon anggota legislatif dari Partai Ummat harus memiliki pandangan politik dan ideologi yang sama pula dengan apa yang sudah ditetapkan oleh partai (Koran Bernas, 25/01/2022).

Berdasarkan teori seleksi kandidat, proses dan pola rekrutmen yang diterapkan di PSI adalah pola candidacy yang inklusif. Pola candidacy inklusif artinya adalah pola yang memperbolehkan siapa saja mendaftar menjadi bakal calon legislatif. Ini sejalan dengan identitas yang selalu ditonjolkan PSI, di mana PSI merupakan partai yang menjunjung tinggi pluralitas berupa perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain. Sedangkan, Partai Ummat sebagai partai yang memiliki basis ideologi islam, hanya memperbolehkan orang-orang dengan ideologi, visi dan tujuan yang sama saja untuk dapat bergabung ke dalam partainya. Selain itu, Partai Ummat menerapkan strategi pendekatan personal kepada para pemuka agama Islam utamanya Muhammadiyah dan menjadikan mereka calon legislatif potensial melalui Partai Ummat. Artinya, Partai Ummat menerapkan pola candidacy yang bersifat eksklusif karena hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke partainya.

Selain dari aspek candidacy, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, pola rekrutmen partai juga dapat dinilai dari aspek selectorate, yaitu siapa yang menentukan seorang kandidat bisa masuk dalam satu partai atau tidak. Penentuan tersebut bisa diputuskan oleh lima kelompok. Dalam aspek ini, PSI mempunyai komite seleksi calon legislatif di setiap Dewan Pimpinan Wilayahnya (Laman Resmi PSI, 2023). Artinya, dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi kandidat di PSI, dilakukan oleh anggota partai dalam bentuk komite. Selain itu, diketahui melalui laman pencarian lowongan kerja bernama "kerjabilitas" diketahui PSI juga membuka lowongan magang dalam komite seleksi caleg yang sedang mereka lakukan. Hal ini dilakukan PSI dalam rangka menciptakan budaya politik yang mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan meritokrasi sehingga PSI ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya yang masih berusia muda, dalam mempersiapkan anggota potensial terbaik PSI yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selain menerapkan model seleksi di mana pemilihnya berasal dari komite internal partai, PSI juga melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dalam bentuk magang. Peserta magang dalam hal ini akan diikutsertakan dalam membantu proses persiapan dan pembuatan tahapan, serta pelaksanaan proses seleksi caleg.

Di sisi lain, cukup berbeda dengan PSI, Partai Ummat juga menerapkan model seleksi yang komite pemilihnya berasal dari anggota partai. Kelompok yang ditugaskan untuk memilih calon kandidat legislatif ini disatukan dalam Divisi Rekrutmen Bacaleg. Melansir dari Harian Jogja (2023), para pendaftar dalam Partai Ummat tidak serta-merta begitu saja langsung diterima, melainkan harus melalui seleksi dan memenuhi persyaratan internal. Seleksi ini utamanya berkaitan dengan kesamaan pandangan yang dimiliki oleh calon kandidat dengan visi misi yang dimiliki partai.



Parameter terakhir yang dapat digunakan untuk menilai proses rekrutmen partai politik adalah candidate selection methods, yaitu apakah kandidat dipilih secara terpusat atau tersebar dalam banyak cabang. Berdasarkan informasi yang sudah berhasil dihimpun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membentuk Komite Seleksi Caleg di setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) (Laman Resmi PSI, 2023). Ini artinya, proses seleksi dan rekrutmen calon kader dilakukan oleh masing-masing cabang, yang kemudian dari cabang tersebut membuat komite seleksi mereka sendiri. Apabila dikontekstualisasikan dengan teori, maka model seleksi kandidat yang dilakukan PSI adalah model desentralistik.

Hampir sama dengan PSI, Partai Ummat sebagai partai baru juga membentuk tim seleksi internal di setiap DPW. Dilansir dari Koran Bernas (25/01/2022), disampaikan bahwa Partai Ummat membentuk Tim Adhoc Pencalegan di setiap DPW. Dari tim ini, ada Divisi Pencalegan yang bertugas untuk mengurus proses pendaftaran hingga seleksi calon kader yang akan maju pencalegan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum proses dan pola rekrutmen yang dilakukan baik oleh Partai Solidaritas Indonesia maupun Partai Ummat masih berorientasi pada kuantitas. Meskipun demikian, PSI hadir dengan metode yang lebih terbuka dibandingkan dengan Partai Ummat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kader yang masuk ke dalam partai. Dengan demikian, mengetahui pola rekrutmen partai saja tidak cukup, sehingga perlu juga untuk mengetahui strategi kedua partai untuk bisa meningkatkan kandidasi dan partisipasi perempuan di dalam partai untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih substantif.

STRATEGI UNTUK MENDORONG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM INTERNAL PARTAI UMMAT DAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Bagian ini akan membahas mengenai strategi masing-masing partai untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam partainya. Penjelasan di bawah merujuk pada beberapa dokumen, artikel jurnal, dan pemberitaan terkait yang relevan.

Berbicara mengenai strategi, Partai Ummat sebagai partai politik baru tentunya harus menyiapkan strategi agar partainya dikenal oleh masyarakat secara luas. Selain itu, urgensi untuk meningkatkan kaderisasi perempuan menjadi penting mengingat keterwakilan 30% perempuan merupakan syarat yang harus mereka penuhi untuk dapat mengikuti pemilu. Mengutip salah satu hasil wawancara dari studi dokumen yang dilakukan (Zulkifli, 2021), salah satu pengurus Partai Ummat dalam hal meningkatkan keterwakilan perempuan membentuk organisasi sayap yang mereka namakan dengan Permata Ummat (Perempuan Utama Ummat).

Dibentuknya organisasi ini setidaknya menunjukkan komitmen besar yang dimiliki Partai Ummat untuk bisa melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan partainya termasuk dalam hal kegiatan politik praktis.



Melansir dari Kompas (9/10/2021), Permata Ummat diketuai oleh Euis Fety Fatayat yang diketahui juga merupakan mantan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menyampaikan bahwa deklarasi Partai Ummat di Yogyakarta menarik begitu besar antusiasme perempuan untuk bisa bergabung. Namun, jumlah anggota DPP terbatas sehingga tidak semua bisa ditampung. Meskipun demikian, antusiasme tersebut tetap ditampung yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pembuatan organisasi sayap Permata Ummat.

Secara terang-terangan, lebih jauh Euis juga menyampaikan bahwa selain untuk menampung antusiasme kelompok perempuan yang begitu besar terhadap Partai Ummat, tujuan lain dari dibentuknya Permata Ummat adalah untuk menjaring dan mengembangkan konstituen. Ia berharap, dengan dibentuknya Partai Ummat, konstituen akan cepat terkumpul dan kemudian dapat memenuhi pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (Kompas, 9/10/2021).

Dalam keterangan lain di Harian Jogja (6/11/2021), disampaikan oleh DPW Permata Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta, Siti Muslichatun, bahwa ia tidak lagi merasa kesulitan saat menjaring kader mengingat banyaknya perempuan yang ingin masuk menjadi anggota dari Permata Ummat. Ia menambahkan bahwa Permata Ummat menysar ibu-ibu dari konstituen perempuan yang juga sebelumnya pernah menjadi pengurus di kepengurusan organisasi partai sebelumnya (organisasi sayap PAN).

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa sejak dideklarasikannya Partai Ummat, sudah terbentuk kepengurusan Permata Ummat di 23 Provinsi. Di setiap kepengurusan terdapat 20 orang, sehingga untuk total pengurus di seluruh Indonesia saja sudah mencapai angka 400 orang. Ini belum termasuk anggota lain karena pendataan masih terus berjalan (Harian Jogja, 6/11/2021).

Banyaknya emak-emak yang berminat untuk bergabung dalam Partai Ummat, membuat Ketua DPP Permata Ummat yakin bahwa organisasi perempuan besutannya akan menyumbang sebanyak 25% dari seluruh suara Partai Ummat pada pemilu pendatang. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya yakin dengan hal itu karena Partai Ummat sudah mulai bergerilya untuk pembuatan KTA dalam rangka pemenuhan persyaratan KPU (Detikcom, 9/9/2022).

Hampir mirip dengan Partai Ummat, PSI dalam mendorong keterwakilan deskriptif maupun substantif di internal partai, PSI melibatkan banyak perempuan dalam berbagai kegiatan maupun kepengurusan partai (Wijaksana, 2018). Strategi ini juga mereka gunakan dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan caleg untuk kebutuhan pemilu. Meskipun demikian, PSI mengaku "bertanggung jawab" atas kader-kader perempuan yang sudah berhasil mereka jaring ini. Artinya, ketika kader sudah terjaring, mereka kemudian memberikan pelatihan bagaimana cara mendapatkan dana untuk kadernya berkampanye.



Selain itu, PSI juga memberikan pembinaan kepada kadernya untuk melakukan kampanye melalui kelas-kelas yang dibuat oleh PSI. Dalam memudahkan pemantauan, PSI juga membagi calegnya ke dalam beberapa kelompok, sehingga mudah ditemukan permasalahan dan kemudian dicari solusi yang tepat (Laman Resmi Partai Solidaritas Indonesia, 2021).

Dalam hasil dokumentasi lain, diketahui strategi PSI yang lain demi memenuhi kuota 30% adalah dengan menargetkan dan mencari kader ke komunitas-komunitas perempuan. Strategi ini mereka sebut dengan "jemput bola". Artinya, untuk mendapatkan kader perempuan untuk dicalonkan dalam Pemilu 2024, PSI turun langsung ke lapangan dan melakukan interaksi personal ke masyarakat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yolanda (2021), dengan interaksi personal, PSI lebih mudah mengidentifikasi permasalahan yang calon kadernya hadapi dan kemudian dibantu untuk mencarinya solusinya.

Terkait dengan upaya partai politik dalam meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan, menurut Alan Will (2015), setidaknya terdapat empat peran partai politik yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian apakah partai tersebut memprioritaskan keterwakilan perempuan atau tidak. Empat indikator tersebut diantaranya adalah: (1) penempatan perempuan dalam struktur organisasi partai (*organizational parties*); (2) penempatan perempuan dalam kerangka kerja lembaga (*party rules*); (3) penempatan perempuan dalam ideologi parpol (*party ideology*), dan (4) seberapa banyak aktivis perempuan mengambil bagian dalam parpol (*women activist*). Kerangka Alan Will tersebut juga digunakan dalam analisis penelitian ini untuk melihat dinamika yang ada dalam internal Partai Ummat dan juga Partai Solidaritas Indonesia dalam memaknai partisipasi perempuan yang bermakna dalam rangka meningkatkan kandidasi keduanya dalam Pemilu 2024.

A. PARTAI UMMAT

Merujuk pada dokumen pendaftaran Partai Ummat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024, susunan kepengurusan Majelis Syuro Partai Ummat diisi seluruhnya oleh laki-laki. Ketua Umum Partai Ummat dijabat oleh Ridho Rahmadi, Wakil Ketua Umum I oleh Agung Mozin, Wakil Ketua Umum III oleh Chandra Tirta Wijaya, Sekretaris Jendral oleh Ahmad Muhadjir Soddrudin, dan Bendahara Umum oleh Benny Suharto.

Menurut penjelasan Alan Will (1998), partai yang sifat kepengurusannya terpusat lebih memiliki kontrol untuk mengatur perempuan-perempuan yang akan dimasukkan ke dalam partainya. Dengan demikian, mekanisme yang sifatnya lebih sentralistik akan memungkinkan pemimpin partai untuk merespons permintaan terkait representasi perempuan yang lebih besar. Selain itu, penempatan perempuan dekat dengan pemimpin partai juga memungkinkan perempuan lebih dilibatkan dalam setiap pembuatan keputusan.



Namun, hal ini tidak terjadi di Partai Ummat. Dapat dilihat bahwa kepemimpinan Partai Ummat di tingkat pusat semuanya diisi oleh laki-laki. Satu-satunya motor penggerak perempuan di Partai Ummat adalah Permata Ummat, yang sistem kerjanya desentralistik dan memiliki kepengurusan di setiap kota. Dalam hal ini, Will berpendapat bahwa sistem yang terdesentralisasi lebih sulit untuk menerapkan dan menunjang keterwakilan perempuan karena penekanan untuk mendukung peran perempuan berarti harus dilakukan dalam tiap wilayah. Sementara, setiap wilayah akan memiliki kendala dan hambatan masing-masing.

Lebih jauh, Alan Will (1998) juga menyampaikan bahwa indikator lain untuk menilai komitmen partai politik terkait dengan keterwakilan perempuan adalah dengan upaya institusionalisasi melalui peraturan internal yang ada dalam partai. Merujuk pada AD/ART Partai Ummat, disebutkan dalam Pasal 6 huruf (j), bahwa salah satu visi Partai Ummat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, dan optimalisasi perannya dalam kemaslahatan ummat. Dalam hal ini, Partai Ummat membentuk organisasi sayap bernama Perempuan Utama Ummat (Permata Ummat). Namun, melihat dari susunan organisasi yang ada, utamanya di tingkat kepengurusan pusat, belum ada perempuan yang berasal dari Permata Ummat, yang kemudian dijadikan pengurus.

Dalam faktor lain yaitu faktor ideologi, dijelaskan bahwa dibandingkan dengan partai yang beraliran ideologi kiri, partai-partai konservatif memang akan lebih sedikit mempertimbangkan peran perempuan dalam posisi yang strategis (Duverger, 1995). Ini kemudian ada kaitannya dengan Partai Ummat yang berlandaskan nilai-nilai Islam konservatif. Dengan demikian, walaupun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalamnya, namun organisasi sayap Permata Ummat hanya dijadikan sebagai "alat" untuk mencapai angka keterwakilan 30%. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ketua Permata Ummat yang dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa ia berharap keberadaan Permata Ummat dapat membantu meningkatkan jaringan kader Partai Ummat utamanya adalah kader perempuan.

B. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Cukup berbeda dengan Partai Ummat, susunan Partai Solidaritas Indonesia terlihat sedikit lebih konsisten dengan apa yang dituangkan dalam AD/ART mereka. Merujuk pada laman resmi Partai Solidaritas Indonesia, dalam susunan Dewan Pembina, setidaknya terdapat dua nama kader perempuan, yaitu Grace Natalie sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Isyana Bagoes Oka sebagai Anggota. Dalam Mahkamah Partai, terdapat Fenty Noverita Indrawaty sebagai Sekretaris dan dalam Dewan Pimpinan Pusat terdapat Suci Mayang Sari sebagai Bendahara Umum.



Menariknya, upaya institusionalisasi peran perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia belum terlihat jelas pada AD/ART yang mereka miliki. Setidaknya, visi PSI menyebutkan bahwa mereka ingin membentuk Indonesia yang berkarakter kerakyatan, bekemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Namun, dalam misi partai tidak satupun yang menyebut bahwa mereka ingin mewujudkan visinya dengan cara meningkatkan peran perempuan di internal partai.

Hal tersebut menarik, mengingat hal ini berkebalikan dengan apa yang terjadi pada Partai Ummat yang mencantumkan pentingnya peran perempuan dalam AD/ART-nya, justru tidak mempraktikkan hal tersebut dalam susunan kepengurusan pusat. Sedangkan PSI, tidak mencantumkan bagaimana komitmen mereka terhadap partisipasi anak muda, namun melibatkan anak muda dalam kepengurusan pusatnya, begitu pula dalam konteks pelibatan dan partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai, bahkan di posisi-posisi yang terbilang strategis.

Meskipun demikian, masih merujuk pada teori Alan Will (1998) mengenai ideologi partai, banyaknya perempuan pada struktur kepengurusan pusat dipengaruhi oleh ideologi partai yang lebih liberal dan progresif. PSI selalu menyatakan dirinya sebagai partai anak muda, yang menjunjung tinggi toleransi, anti korupsi dan keberagaman. Berangkat dari hal tersebut, dapat dinilai sementara bahwa terlibatnya banyak perempuan dalam kepengurusan PSI dikarenakan ideologi dan kepercayaan yang mereka pegang akan nilai-nilai keberagaman.

MODEL SELEKSI KANDIDAT MEMENGARUHI KANDIDASI PEREMPUAN

Bagian pembahasan dalam tulisan ini menyajikan data menarik, di mana Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia sebagai sesama partai baru, memiliki tingkat kandidasi perempuan yang tidak terpaut jauh angkanya, yaitu di kisaran 40%. Fakta ini cukup memikat perhatian, mengingat kedua partai tersebut merupakan partai yang memiliki ciri dan karakteristik yang cukup berbeda jauh.

Partai Solidaritas Indonesia dengan nilai-nilai liberalismenya, memiliki mekanisme rekrutmen yang cukup terstruktur dan rigid dibandingkan dengan Partai Ummat dengan nilai konservatif Islam yang mereka pegang. Sistem yang rigid seharusnya malah justru dapat membuat calon kandidat merasa dipersulit dan "malas" ketika hendak mendaftarkan dirinya di Partai Solidaritas Indonesia. Namun, hal itu ternyata tidak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena ideologi kuat yang dipegang oleh PSI terkait dengan keberagaman dan kenyataan bahwa PSI dengan segala citranya yang cukup kontroversial dan sensasional dengan beragam kritik kebijakan yang kritis, berani, dan tajam, terutama saat baru muncul juga telah menjadi magnet yang cukup menarik bagi masyarakat.



Selain itu, PSI juga mengklaim dirinya sebagai partai anak muda yang kadernya kebanyakan berasal dari kelompok baru yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam agenda politik praktis manapun. Ini bisa saja berpengaruh terhadap kandidasi perempuan yang ada di dalamnya karena PSI membawa semangat dan idealisme, serta juga cita-cita perjuangan yang baru.

Di sisi lain, Partai Ummat hadir baru sekitar dua tahun terakhir ini sekitar tahun 2020. Artinya, Pemilu 2024 adalah pemilu pertama yang akan mereka ikuti. Besarnya angka kandidasi perempuan dalam Partai Ummat diyakini berkaitan dengan debut pertama mereka sebagai partai peserta pemilu. Hal ini mengingat, salah satu syarat untuk dapat mengikuti pemilu adalah adanya keterwakilan perempuan sebesar minimal 30% dalam partainya.

Hal tersebut yang kemudian menjustifikasi bagaimana pendirian Perempuan Utama Ummat (Permata Ummat) dapat memengaruhi kandidasi perempuan di dalamnya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari Euis Fety Fatayaty sebagai Ketua sekaligus Koordinator Permata Ummat. Seperti yang telah disebutkan di atas, Euis sempat menyampaikan harapannya terkait dengan eksistensi Permata Ummat yang dapat meningkatkan jumlah kader perempuan di dalam partai.

Langkah ini cukup dapat diterima mengingat Partai Ummat adalah partai baru yang masih membutuhkan pijakan dan pondasi kuat untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Strategi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Anne Phillip, di mana keterwakilan dibagi menjadi dua, yaitu political idea dan political presence. Ide-ide politik tidak mampu hadir tanpa adanya kehadiran. Argumen ini juga yang kemudian cocok untuk menggambarkan strategi Partai Ummat yang mendorong kehadiran perempuan terlebih dahulu di awal-awal kontestasi, dan akan memperbaiki ide serta mekanismenya kemudian. Lebih jauh, bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik dapat mendorong political idea dan political presence perlu dikaji lebih jauh dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Sejak penerapan kebijakan afirmatif di Indonesia, partai politik harus memiliki setidaknya 30% kader perempuan di tingkat pusat. Hal ini diatur dalam Undang-undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen. Kebijakan kuota gender ini juga mewajibkan partai politik yang mencalonkan anggota legislatif untuk pemilihan umum untuk memiliki setidaknya 30% kandidat perempuan.



Kebijakan tersebut berdampak pada bagaimana partai politik merekrut kader perempuan, meskipun terdapat tantangan besar seperti hambatan budaya dan institusional. Contoh nyata yang sering muncul dalam konteks kuota dan stereotipe gender adalah terkait dengan penggunaan citra seksual dalam kampanye politik, atau strategi rekrutmen “jemput bola” yang kurang substantif dan hanya berorientasi pada kuantitas (Aspinall, 2021).

Kritik semacam ini menunjukkan perlunya sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dalam memenuhi kuota gender. Sementara kuota mungkin menjadi langkah awal yang penting untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, perlu ada penekanan pada pengembangan kader perempuan yang berkualitas dan kompeten. Hal ini akan membantu menghindari kesan bahwa kuota hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi target tanpa memperhatikan integritas dan kapasitas para kandidat. Dengan demikian, penting bagi partai politik untuk memastikan bahwa langkah-langkah mereka untuk memenuhi kuota gender dilakukan dengan serius dan memperhatikan aspek kualifikasi serta kemampuan para kandidat, tanpa mengedepankan stereotipe dan citra seksual dalam prosesnya.

Dalam konteks Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat sebagai partai baru, penelitian ini mencatat bahwa strategi dan pola rekrutmen seringkali dilakukan dalam rangka memenuhi kuota “kehadiran” 30% perempuan di setiap partai tanpa mempertimbangkan ide dan gagasan apa yang bisa mereka bawa dalam kontestasi. Lagi-lagi, tidak ada yang salah dan benar dalam hal ini mengingat argumen yang disampaikan oleh Anne Phillip bahwa ide dan gagasan politik tidak akan hadir tanpa adanya kehadiran terlebih dahulu. Meskipun, idealnya, kehadiran politisi perempuan dalam partai politik juga harus diikuti oleh representasi dan partisipasi politik yang bermakna, serta gagasan-gagasan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat pada umumnya dan perempuan khususnya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, Partai Solidaritas Indonesia secara masif menjaring kader perempuan dengan cara “jemput bola” atau mendatangi langsung calon-calon potensial untuk dicalonkan dalam pemilihan wakil legislatif. Dalam hal ini, perempuan yang bersedia dicalonkan menjadi anggota legislatif melalui PSI tidak kemudian begitu saja menjadi kader melainkan harus melewati proses seleksi lagi.

Tidak kalah dengan PSI, Partai Ummat juga bergerak cukup masif dengan membentuk organisasi sayap khusus perempuan bernama Permata Ummat dengan harapan dapat menjaring lebih banyak emak-emak (kader perempuan yang rentang usianya adalah 40 tahun ke atas) dengan harapan dapat meningkatkan persentase 30% perempuan dalam Partai Ummat.



REKOMENDASI

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dalam rangka memperbaiki sistem dan strategi rekrutmen kader perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia maupun Partai Ummat.

- Membuka pintu yang seluas-luasnya dan menciptakan ruang partisipasi politik yang ramah untuk perempuan dalam rangka rekrutmen anggota partai politik, pengkaderan, maupun pencalonan.
- Mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan partai dan memberikan posisi kepemimpinan kepada mereka dengan upaya peningkatan kapasitas dan memberikan dukungan yang strategis dan memadai, serta mempertimbangkan merit system.
- Peningkatan kapasitas kader perempuan Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat melalui pelatihan dan pendidikan politik. Hal ini juga mencakup bagaimana partai memberikan jaringan dukungan kepada perempuan yang tertarik terlibat dalam politik.
- Mendorong peningkatan kapasitas kader perempuan dalam melakukan kampanye publik dengan dukungan sumber daya yang memadai. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik para kader, termasuk kader perempuan, serta menciptakan partai politik yang peka gender dan inklusif. Misalnya, lewat kegiatan internal maupun yang melibatkan pihak terkait lainnya (Misalnya: lembaga penelitian; Lembaga Masyarakat Sipil (LSM); akademisi; kampus) dalam lokakarya, seminar, konferensi, dan lain sebagainya.
- Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat terkait partisipasi dalam partai politik serta penerapan tata kelola yang baik, serta perspektif gender dan hak asasi manusia, juga penting untuk dilakukan dalam mengatasi permasalahan stereotip dan bias gender. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait topik-topik dasar tersebut, termasuk dalam mendorong dan mendukung peningkatan representasi dan partisipasi perempuan yang bermakna dalam politik.



REFERENSI

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI. (n.d.) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.munawir.id/wp-content/uploads/2021/10/AD-ART-PSI.pdf.
- Feriyanto, I. (Agustus 7 2023). Vermin Bacaleg Diperpanjang Lagi, PSI dan Partai Ummat Berpeluang Lolos Seleksi Administrasi. Diakses dari Radar Banyuwangi: <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/752434035/vermin-bacaleg-diperpanjang-lagi-psi-dan-partai-ummat-berpeluang-lolos-seleksi-administrasi>.
- Hanafi, A. (2019). "Gambaran Umum Partai Ummat". Jurnal Universitas Sumatera Utara, 17-26.
- Kaderisasi, Partai Ummat Kedepankan Leadership Engineering. (21 September 2021). Diakses dari Radar Jogja: <https://radarjogja.jawapos.com/politik/65751912/kaderisasi-partai-ummat-kedepankan-leadership-engineering>.
- Komite Seleksi Caleg Intern. (n.d.). Diakses dari Kerjabilitas: https://kerjabilitas.com/main_page/public_vacancy_detail.php?novac=NDM00Q==.
- Partai Ummat Gresik Kawal Rekrutmen Caleg Bermartabat dan Bebas Money Politic. (4 Januari 2023). Diakses dari Radar Jatim: <https://radarjatim.id/partai-ummat-gresik-kawal-rekrutmen-caleg-bermartabat-dan-bebas-money-politic/>.
- Pers, S. (25 Januari 2022). Partai Ummat Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Gratis. Diakses dari Koran Bernas: <https://koranbernas.id/partai-ummat-buka-pendaftaran-bakal-calon-legislatif-gratis>.
- Revanda, H. (5 Oktober 2023). Puan Maharani Bertemu Kaesang Siang Ini Bersama Elite PDIP dan PSI. Diakses dari Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1780166/puan-maharani-bertemu-kaesang-siang-ini-bersama-elite-pdip-dan-psi?tracking_page_direct.
- Strategi Menang Berjamaah :Partai Ummat Gelar Pembekalan Caleg DPR RI . (13 September 2023). Diakses dari Batam Times: <https://www.batamtimes.co/2023/09/12/strategi-menang-berjamaah-partai-ummat-gelar-pembekalan-caleg-dpr-ri/>.
- Sunartono. (6 November 2021). Kelompok Emak-emak Ini Siap Berjuang untuk Partai Ummat. Diakses dari Harian Jogja: <https://news.harianjogja.com/read/2021/11/06/500/1087554/kelompok-emak-emak-ini-siap-berjuang-untuk-partai-ummat>.
- Sunartono. (25 Januari 2022). Partai Ummat DIY Tegaskan Perekrutan Caleg Tanpa Mahar. Diakses dari Harian Jogja: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/01/25/510/1094018/partai-ummat-diy-tegaskan-perekrutan-caleg-tanpa-mahar>.
- Tanton, N. E. (2018). "Citra Partai Solidaritas Indonesia di Publik Milenial Surabaya". Jurnal e-Komunikasi, 1-12.



PROFIL PENULIS



Felia Primaresti (Felia) adalah Peneliti Bidang Politik di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Felia merupakan lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada tahun 2022. Selama masa perkuliahan, Felia aktif dalam beberapa proyek penelitian di UGM salah satunya dengan PolGov (Research Centre for Politics and Government) dengan fokus kajian riset metode big data. Selain itu, Felia juga pernah berkontribusi dalam salah satu proyek hibah riset bersama bersama Rutgers Indonesia dengan fokus kajian gender melalui perspektif agama.

Sebelum bergabung dengan TII, Felia aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan manajemen proyek riset sebagai Project Manager Intern di salah satu perusahaan rintisan penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta.

Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Felia memiliki fokus kajian dan minat pada bidang-bidang politik perempuan, politik gender, serta politik agama.



PROFIL LEMBAGA

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), diskusi bulanan (The Indonesian Forum; Policy Talks; Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta Podcast (Ngobrol Kebijakan/Ngobi).

